

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang berlangsung dengan sangat cepat ini, pelaporan keuangan perusahaan memiliki peranan yang sangat vital sebagai salah satu alat utama dalam komunikasi informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan. Informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya merupakan dasar utama bagi investor, kreditor, regulator, dan berbagai pihak lain dalam pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Kualitas dan integritas laporan keuangan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut dapat mendukung pertumbuhan dan kelangsungan bisnis secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, manajemen perusahaan berperan sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu tanggung jawab utama manajemen adalah menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan umumnya memiliki harapan agar perusahaan dapat meraih laba yang maksimal. Laba ini berfungsi sebagai salah satu indikator utama untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ketika perusahaan berhasil memperoleh laba yang tinggi, hal ini biasanya diartikan sebagai tanda bahwa kinerja perusahaan tersebut baik. Sebaliknya, jika laba yang diperoleh rendah, kinerja perusahaan akan dinilai kurang memuaskan. Oleh karena itu, informasi

mengenai laba perusahaan sangat penting dan dapat diakses melalui laporan keuangan yang disusun secara berkala (Palupi & Aurelia, 2022). Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No 8 tahun 2010 Informasi laba adalah suatu indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen (*agent*) dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditentukan oleh pemilik (*principal*) untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka panjang yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, manajemen dihadapkan pada fleksibilitas dalam memilih metode akuntansi, sebagaimana diizinkan oleh PSAK 109. Hal tersebut berkaitan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan perusahaan lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi laba adalah dengan melakukan praktik manajemen laba (Palupi & Aurelia, 2022). Salah satu tanggung jawab manajemen adalah menyediakan informasi laba yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Kecenderungan investor yang menilai informasi laba sebagai indikator kinerja perusahaan dapat menimbulkan perilaku manajemen yang tidak berfungsi dalam menunjukkan hasil informasi laba atau manajemen laba (Nugrahanti & Nugroho, 2022).

Manajemen laba telah menjadi salah satu topik yang menarik perhatian dalam bidang akuntansi dan keuangan, terutama terkait dampaknya terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Praktik manajemen laba sering kali dipandang sebagai upaya manajerial untuk memanipulasi laporan keuangan demi mencapai tujuan tertentu, seperti menarik minat investor, memenuhi target keuangan, atau memperoleh keuntungan lain yang bersifat strategis. Perusahaan seringkali terdorong untuk melakukan manajemen laba guna meningkatkan nilai saham, memenuhi target kinerja, atau menghindari pajak. Manajemen laba merupakan tindakan manajer dalam menggunakan kebijakan akuntansi atau keputusan operasional untuk memengaruhi angka laba yang dilaporkan, dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan, atau untuk memengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka laba yang dilaporkan (Sulistyanto, 2018).

Praktik manajemen laba telah menjadi perhatian utama bagi investor dan regulator di berbagai negara. Di Prancis, misalnya, penelitian oleh Hamdi, (2024) menemukan bahwa keberadaan koneksi politik pada direktur independen cenderung berpengaruh dengan kualitas laba yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan direktur independen yang terkoneksi politik lebih mungkin terlibat dalam manajemen laba, baik melalui akrual diskresioner maupun manipulasi aktivitas riil. Pada penelitian lain di Pakistan oleh Baig dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa bisnis yang terkoneksi politik cenderung menggunakan teknik manajemen laba riil (REM)

yang menurunkan pendapatan lebih sering, karena teknik ini mengurangi risiko deteksi dan memberikan perlindungan kepada manajer. Sementara itu, di Amerika Serikat, Ahmed dkk. (2022) menemukan bahwa berkurangnya ancaman penegakan hukum akibat koneksi politik mengurangi biaya manajemen laba berbasis akrual (AEM), sehingga memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam lebih banyak AEM. Variasi temuan ini menunjukkan kompleksitas dan konteks spesifik yang memengaruhi praktik manajemen laba di berbagai negara.

Dalam praktiknya, menurut Viana dkk., (2023) manajemen laba tidak hanya dilakukan melalui kebijakan akuntansi (*accrual earnings management/AEM*), tetapi juga melalui keputusan operasional riil perusahaan atau *real earnings management* (REM). AEM dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi, seperti pengaturan/estimasi akrual dan metode pencatatan, sehingga relatif lebih mudah dideteksi oleh auditor maupun regulator. Sebaliknya, REM dilakukan melalui aktivitas bisnis nyata, seperti mempercepat penjualan dengan diskon besar, mengurangi biaya diskresioner, atau memproduksi secara berlebihan untuk menekan biaya per unit. Karena melibatkan keputusan operasional yang tampak wajar, REM cenderung lebih sulit diidentifikasi sebagai bentuk manipulasi laba.

Literatur empiris terbaru menunjukkan adanya perbedaan yang cukup kuat antara AEM dan REM, baik dari sisi motivasi maupun implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Menurut Viana, dkk (2023) menegaskan bahwa ketika pengawasan terhadap praktik akrual semakin ketat, misalnya akibat

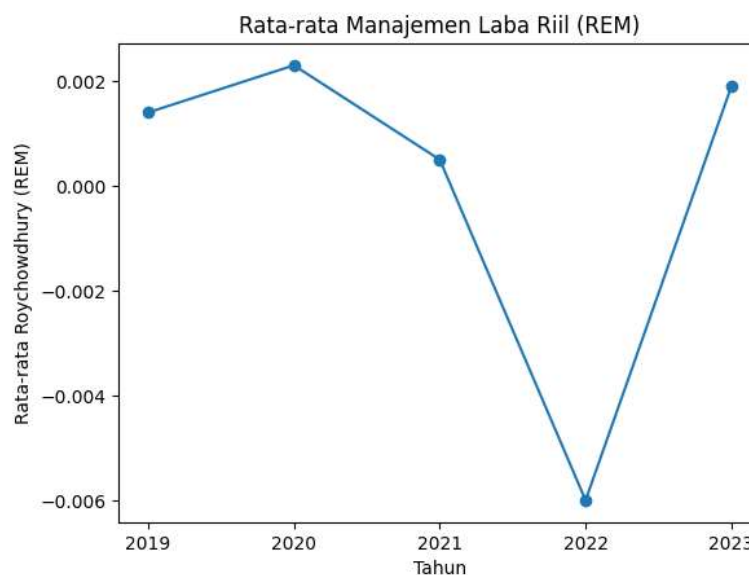
regulasi yang lebih kuat atau kualitas audit yang tinggi, manajer cenderung mengalihkan strategi manajemen laba dari AEM ke REM. Hal ini disebabkan karena REM lebih sulit dibatasi oleh standar akuntansi dan tidak secara langsung melanggar aturan pelaporan keuangan.

Namun demikian, REM dinilai memiliki konsekuensi ekonomi yang lebih serius dibandingkan AEM. Manipulasi melalui aktivitas riil berpotensi merusak efisiensi operasional perusahaan dalam jangka panjang, karena keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi optimal, melainkan pada tujuan pelaporan laba jangka pendek. Oleh karena itu, meskipun AEM dan REM sama-sama bertujuan untuk memengaruhi angka laba, REM dianggap lebih berbahaya karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga pada kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada manajemen laba riil sebagai bentuk manipulasi yang lebih sulit terdeteksi dan memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam konteks perusahaan dengan karakteristik tertentu seperti koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kualitas pengawasan eksternal.

Salah satu model yang umum digunakan untuk mengukur praktik manajemen laba riil adalah Model (Roychowdhury, 2006). Model ini dikembangkan untuk mengidentifikasi tindakan manajerial yang memanipulasi laba melalui aktivitas operasional perusahaan, seperti manipulasi arus kas operasi, produksi berlebih, dan pengurangan biaya diskresioner. Berbeda

dengan model akrual, model *Roychowdhury* berfokus pada penyimpangan aktivitas riil perusahaan dari tingkat normalnya, sehingga mampu menangkap bentuk manajemen laba yang dilakukan melalui keputusan operasional nyata. Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya dalam mendeteksi praktik manajemen laba yang relatif sulit diidentifikasi melalui pendekatan akrual serta telah banyak digunakan dalam penelitian empiris baik di tingkat internasional maupun di Indonesia, sehingga validitas dan reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 1.1 Rata rata Roychowdhury (2019-2023)

Berdasarkan grafik rata-rata REM periode 2019-2023, terlihat bahwa praktik manajemen laba riil perusahaan di Indonesia menunjukkan pola fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, nilai rata-rata REM berada pada tingkat positif dengan intensitas relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi aktivitas riil telah terjadi, namun belum berada pada tingkat yang agresif. Secara teoritis, praktik REM muncul ketika manajemen

memiliki insentif untuk memenuhi target laba tertentu melalui penyesuaian aktivitas operasional (Roychowdhury, 2006).

Memasuki tahun 2020, rata-rata REM mengalami peningkatan dan mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini bertepatan dengan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian kinerja perusahaan. Dalam situasi krisis, manajemen cenderung melakukan manipulasi aktivitas riil seperti pemberian diskon besar untuk meningkatkan penjualan, *overproduction* untuk menurunkan biaya per unit, atau pengurangan biaya diskresioner guna menjaga laba (Roychowdhury, 2006; Cohen & Zarowin, 2010). Secara perspektif teori agensi, tekanan eksternal meningkatkan insentif oportunistik manajer untuk mempertahankan reputasi dan kontrak kompensasi (Jensen & Meckling, 1976).

Memasuki tahun 2021, nilai rata-rata REM mulai menurun dan mendekati nol. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai fase transisi pasca shock awal pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi pasar dan adanya stimulus kebijakan pemerintah, tekanan untuk mempertahankan laba secara agresif mulai berkurang.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2021 mulai memperketat pengawasan pelaporan keuangan dalam rangka menjaga stabilitas pasar modal selama masa pemulihan ekonomi. Peningkatan monitoring ini dapat menurunkan insentif manajer untuk melakukan manipulasi aktivitas riil.

Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana rata-rata REM berada pada nilai negatif. Tahun 2022 merupakan fase pemulihan ekonomi pascapandemi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,31% (Badan Pusat Statistik, 2023), sehingga tekanan terhadap manajemen untuk mempertahankan kinerja laba melalui manipulasi aktivitas riil relatif menurun. Menurut Roychowdhury, (2006), praktik manajemen laba riil cenderung meningkat ketika perusahaan menghadapi tekanan laba yang tinggi. Dengan meredanya tekanan tersebut, maka dorongan untuk melakukan REM juga ikut berkurang. Selain itu, peningkatan pengawasan regulator dan penguatan transparansi laporan keberlanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode ini mempersempit ruang oportunistik manajer, sejalan dengan teori agensi dari Jensen & Meckling, (1976) yang menyatakan bahwa pengawasan yang lebih kuat akan menekan perilaku oportunistik.

Pada tahun 2023, rata-rata REM kembali meningkat dan berada pada nilai positif. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan praktik manajemen laba riil seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan stabilitas kinerja perusahaan. Menurut Roychowdhury, (2006), REM sering digunakan ketika perusahaan ingin memenuhi ekspektasi pasar melalui penyesuaian aktivitas operasional. Dalam fase pertumbuhan kembali, tekanan untuk menunjukkan kinerja yang konsisten dapat mendorong manajer menggunakan strategi manipulasi riil secara moderat. Dari perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), dinamika ini mencerminkan bahwa perilaku oportunistik manajer bersifat situasional dan bergantung pada insentif serta tekanan eksternal

yang dihadapi perusahaan. Meskipun demikian, tingkat REM pada tahun 2023 belum melampaui puncak yang terjadi pada tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba riil masih berada dalam fase penyesuaian.

Secara keseluruhan, grafik diatas menunjukkan bahwa praktik manajemen laba riil bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta lingkungan pengawasan. Pola fluktuasi tersebut memberikan dasar yang relevan untuk analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba riil, khususnya peran koneksi politik perusahaan.

Menurut Narda & J Kuwado, (2023), fenomena dengan manipulasi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk berkaitan erat dengan manajemen laba. Manajemen laba di sini tercermin dari pencatatan proyek fiktif atau proyek yang belum selesai sebagai pendapatan, serta penggunaan sub-kontraktor fiktif untuk menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik dari kenyataan agar dapat menarik investor, mempertahankan harga saham, dan memenuhi target keuangan, terutama di tengah tekanan untuk menunjukkan laba.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pelaporan keuangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

mengatur tanggung jawab direksi dan komisaris, praktik manajemen laba masih dapat terjadi.

Hal ini menjadi nyata karena tantangan dalam implementasi dan pengawasan pelaporan keuangan yang akurat dan jujur di lapangan. Namun, menyikapi hal tersebut, kini telah hadir regulasi yang lebih komprehensif dan diperbarui seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang mulai dioptimalkan pelaksanaannya pada tahun 2025, mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi secara ketat dengan rekonsiliasi internal dan eksternal yang lebih sistematis. Selain itu, adanya revisi dan penegasan tanggung jawab dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperbarui UU Perseroan Terbatas, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang menambah pasal pidana terkait rekayasa laporan keuangan, menjadi langkah hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan menindak praktik manipulasi seperti manajemen laba secara efektif.

Di sisi lain, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) juga diperbaharui mulai 2025 untuk menyesuaikan ketentuan pengakuan dan pengukuran laporan keuangan sesuai standar internasional yang ketat guna meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dengan regulasi terbaru ini, pengawasan dan akuntabilitas diperkirakan akan semakin kuat, sehingga praktik manipulasi laporan keuangan dapat diminimalkan dan kepercayaan pasar akan meningkat secara signifikan.

Berbagai faktor dapat mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba. Faktor-faktor ini dapat berasal dari insentif internal maupun eksternal. Secara internal, manajer mungkin termotivasi oleh insentif kontraktual seperti bonus berbasis laba, atau untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh dewan direksi. Dari sisi eksternal, tekanan dari pasar modal untuk memenuhi ekspektasi analis, menjaga harga saham, atau bahkan menghindari intervensi regulasi dapat mendorong praktik manajemen laba (Cahyadi & Davianti, 2020). Selain itu, karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, usia perusahaan, nilai pasar terhadap nilai buku, profitabilitas, struktur modal, kualitas audit, risiko litigasi, dan tingkat *leverage* juga seringkali dikaitkan dengan praktik manajemen laba. Di antara berbagai faktor tersebut, koneksi politik muncul sebagai variabel eksternal.

Menurut Kesaulya, dkk (2023), koneksi politik dalam konteks perusahaan telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam kajian manajemen laba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di mana perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. Koneksi politik mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh politik, seperti pejabat, pemerintah, anggota legislatif, atau partai politik. Dalam konteks perusahaan, koneksi politik telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam kajian manajemen laba.

Fenomena koneksi politik di negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali memiliki peran yang lebih menonjol dalam lingkungan bisnis.

Lingkungan institusional mungkin belum sepenuhnya matang, regulasi yang terkadang ambigu, dan potensi intervensi pemerintah yang lebih besar dalam perekonomian dapat menjadikan koneksi politik mungkin mendapatkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses ke sumber daya, kontrak pemerintah, perlakuan regulasi yang lebih menguntungkan, atau bahkan perlindungan dari ancaman hukum (Supatmi & Putri, 2022).

Kaitannya dengan manajemen laba, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Dalam penelitian Khalil, (2022) menemukan bahwa koneksi politik memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba berbasis akrual (AEM) dan riil (REM). Ini bisa diartikan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik mungkin mendapat perlakuan atau akses khusus yang membuat mereka tidak perlu lagi melakukan manipulasi laba secara agresif untuk memenuhi ekspektasi atau mendapatkan keuntungan, sehingga praktik manajemen laba berkurang. Singkatnya, adanya koneksi politik dalam perusahaan dapat mengurangi dorongan atau kebutuhan untuk melakukan manajemen laba dalam bentuk akrual maupun riil, karena perusahaan mungkin telah mendapat kemudahan atau perlindungan tertentu akibat hubungan tersebut. Hubungan negatif antara koneksi politik dan manajemen laba lebih jelas terlihat pada perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik dan yang diaudit oleh salah satu dari Big 4.

Di sisi lain, pada penelitian Widi & Tri, (2022) menjelaskan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba karena perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan politik sering kali

mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, sehingga memberikan manajer lebih banyak kebebasan untuk melakukan praktik manajemen laba tanpa takut akan konsekuensi hukum.

Pada penelitian Palupi & Aurelia, (2022) juga menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba riil, yang berarti perusahaan dengan koneksi politik cenderung melakukan praktik manajemen laba riil lebih sedikit, mungkin karena dorongan untuk fokus pada keberlanjutan jangka panjang dan menghindari manipulasi laba yang dapat merugikan reputasi. Variasi temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba adalah kompleks dan mungkin dipengaruhi oleh konteks spesifik negara, struktur tata kelola, serta jenis manajemen laba yang diukur.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perilaku manajemen laba riil (REM) pada perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik di Indonesia. Fokus pada REM dipilih karena praktik ini lebih sulit dideteksi oleh regulator dan auditor, mencerminkan perilaku manajerial yang nyata, dan memiliki dampak langsung pada kinerja operasional jangka panjang. Berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa koneksi politik memberikan “ruang gerak” untuk memanipulasi laba, penelitian ini justru didasarkan pada argumen bahwa koneksi politik dapat berfungsi sebagai mekanisme tata kelola tambahan.

Dalam konteks ini, perlindungan dan manfaat yang diberikan oleh koneksi politik dapat mengurangi insentif manajer untuk melakukan

manajemen laba yang oportunistik. Koneksi politik dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, sehingga manajer tidak perlu memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kinerja yang buruk atau memenuhi target tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika yang terjadi di perusahaan-perusahaan ini, khususnya bagaimana faktor politik dapat berperan dalam mengendalikan pengambilan keputusan manajerial yang terkait dengan manipulasi laba.

Dengan menggunakan pendekatan teori agensi tipe I, penelitian ini akan menyoroti bagaimana untuk memahami dinamika antara *principal* dan *agent*, serta bagaimana asimetri informasi dan perilaku oportunistik dapat mempengaruhi praktik manajemen laba di perusahaan. Dilihat dari banyaknya penelitian terdahulu yang telah menggunakan teori agensi untuk menganalisis praktik manajemen laba, masih terdapat kontradiksi dan konsistensi hasil penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Selain itu, hubungan antara koneksi politik dan manajemen laba masih belum jelas dan perlu diteliti kembali. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di luar negeri dan menggunakan data sebelum tahun 2019, sehingga kurang merepresentasikan kondisi terkini di Indonesia. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba khususnya pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada periode 2019-2023. Data penelitian diperoleh dari IDX berupa laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah koneksi politik memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Operasional (Praktis)

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang akuntansi terkait koneksi politik terhadap manajemen laba.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan terutama jika memiliki koneksi politik.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih informatif dan hati-hati, dengan mempertimbangkan potensi risiko yang terkait dengan praktik manajemen laba pada perusahaan yang terkoneksi politik.

1.4.2 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait koneksi politik terhadap manajemen laba dengan memperkaya literatur akuntansi yang ada, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kekuasaan politik dan praktik akuntansi.